



**MODUL DASAR-DASAR KEPENDUDUKAN
(KSM123)**

**MODUL 14
KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN**

DISUSUN OLEH
Rini Handayani, S.K.M., M. Epid

Universitas
Esa Unggul

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan kependudukan. Adapun cakupan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah:

1. Definisi Kebijakan Kependudukan
2. Dasar Teori Kebijaksanaan Kependudukan
3. Sifat Kebijakan Kependudukan
4. Tujuan Kebijakan Kependudukan
5. Pentingnya Kebijakan Kependudukan
6. Penentuan Kebijakan Kependudukan

B. Uraian dan Contoh

1. Definisi Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan penduduk dapat juga diartikan sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk.

PBB mendefinisikan kebijakan kependudukan adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, social, demografi, politik dan tujuan umum lainnya.

2. Dasar Teori Kebijakan Kependudukan

a. Teori Deontik

Teori ini memusatkan perhatian pada hak dan kewajiban generasi sekarang kepada generasi yang akan datang. Teori ini mengemukakan bahwa generasi yang akan datang mempunyai kesempatan hak hidup dan hak akan perlakuan yang adil dan sederajat dengan generasi sebelumnya. Generasi sekarang mempunyai kewajiban moral untuk melangsungkan dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan.

Dalam pandangan teori ini, intervensi pemerintah memegang peran penting untuk menentukan besarnya generasi berikutnya. Penentuan ini harus mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang ada di sebuah negara.

Pemerintah bertugas untuk memberikan jaminan atas kualitas hidup minimal bagi setiap warga negara. Bila suatu negara tidak sanggup, maka pemerintahannya perlu melakukan kebijakan kependudukan, salah satunya dengan mengurangi jumlah kelahiran.

b. Teori Lingkungan

Pada dasarnya, kebijakan kependudukan ini memusatkan perhatian pada akibat pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan hidup. Teori ini didasari oleh tiga tesis utama, yaitu:

1. Limit thesis

Tesis ini memiliki 4 asumsi dasar, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk memiliki batas yang pasti
- b. Batas tersebut hampir tercapai

- c. Apabila batas tersebut terlalu dekat, akan terjadi perlonjakkan tingkat kematian di dunia
- d. Walaupun titik batas tersebut masih cukup jauh, pertumbuhan ekonomi dan penduduk harus dibatasi.

Teori ini mengemukakan bahwa penyebab utama keparan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta pemborosan sumber daya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Tanpa mengontrol pertumbuhan penduduk sumber daya di bumi yang sangat terbatas akan habis.

Cara terbaik untuk menjamin kecukupan sumber daya dan kelestariannya adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung subsistensi manusia diikuti dengan kebijaksanaan kependudukan melalui pembatasan manusia yang dilahirkan.

2. Cornucopion thesis

Teori ini memiliki pandangan yang lebih optimis mengenai hubungan manusia dengan lingkungan disekitarnya. Asumsi dasarnya adalah:

- a. Titik batas pertumbuhan hanya terdapat bila ilmu dan teknologi sudah tidak dikembangkan lagi.
- b. Walaupun ilmu dan teknologi sudah berhenti berkembang, titik batas itu masih jauh
- c. Betapapun pertumbuhan ekonomi itu bermanfaat bagi manusia dan karena itu harus dilanjutkan

Thesis ini berpendapat bahwa titik batas itu perlu diperhatikan karena dunia dan kehidupannya secara perlahan-lahan berjalan menuju titik batas itu.

Meskipun secara teoritis manusia mempunyai daya dan kemampuan untuk berupaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat, masalah-masalah lingkungan itu belum dapat teratasi secara efektif sebab ada hambatan-hambatan teknis dan institusional yang masih belum mampu untuk dibatasi manusia.

3. Gabungan kedua teori diatas

Pandangan ini berusaha mengambil jalan tengah dari kedua pandangan diatas. Pandangan ini menyatakan bahwa pada masa yang akan datang dunia akan menghadapi serangkaian “masalah transisi” karena terpaksa mencari bahan pengganti satu sumber dengan sumber lain. Dalam mencari bahan pengganti ini akan terjadi kompetisi sehingga beberapa negara atau kelompok negara akan dirugikan, sedangkan negara lain akan mendapatkan keuntungan.

Untuk menjaga kompetensi yang tidak sehat, maka diperlukan usaha yang dapat mengatasi hambatan-hambatan praktis, sosial, dan kelembagaan selama periode transisi tersebut berlangsung. Pandangan ini menyarankan kegiatan pertumbuhan ekonomi dan penduduk harus dikurangi karena keduanya dapat mempengaruhi intensitas dan frekuensi masalah lingkungan.

3. Sifat Kebijakan Kependudukan

Sifat kebijakan kependudukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kebijaksanaan langsung, antara lain program pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarnya penduduk akibat penurunan banyaknya kelahiran
- b. Kebijaksanaan tidak langsung, misalnya melalui ketentuan peraturan pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu

4. Tujuan Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a. Melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri terutama generasi yang akan datang
- b. Memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan yang terbaik bagi kesejahteraan diri dan keluarganya.
- c. Kebijakan harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk

5. Pentingnya Kebijakan Kependudukan

Salah satu fungsi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat (tujuan paling mendasar dari setiap kebijakan pembangunan). Perilaku demografi (*demografi behavior*) terdiri dari sejumlah tindakan individu. Tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Namun, kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Oleh karena itu

pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu.

6. Penentuan Kebijakan Penduduk

Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan penduduk, yaitu:

- a. Kualitas penduduk
- b. Stabilitas sumber kehidupan penduduk
- c. Kelangsungan adanya lapangan kerja
- d. Standar kehidupan yang baik



PROGRAM KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan kependudukan yang ada di Indonesia.

C. Uraian dan Contoh

1. Sejarah Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Kebijakan kependudukan di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menyadari bahwa kepadatan penduduk di pulau Jawa semakin tinggi. Hingga Sensus Penduduk (SP) pertama yang dilakukan di Jawa pada tahun 1905 menunjukkan bahwa penduduk Jawa telah mencapai 30 juta jiwa.

Pemerintah kolonial kemudian mulai memikirkan adanya proyek pemukiman kembali (resettlement) yakni penempatan petani-petani dari daerah di pulau Jawa yang padat penduduknya, ke desa-desa baru yang disebut “koloni” di daerah-daerah di luar Jawa yang belum ada atau sedikit penduduknya. Hal ini juga dipandang sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan ini kemudian dikenal sebagai kebijakan kolonisasi.

2. Kebijakan Kependudukan Indonesia

Selama ini, masalah kependudukan boleh dikatakan masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat. Baik itu dari para politisi, tokoh agama, pakar ekonomi maupun tokoh

masyarakat lainnya. Memang pada saat ini sebagian besar orang pada umumnya sudah tidak berkeberatan lagi dengan program untuk mengontrol kelahiran, tetapi sayangnya masih kurang sekali kesadaran untuk melaksanakannya.

Pada zaman Orde Lama, dari pihak pemerintah pun tidak ada kesadaran akan masalah ini. Pada saat itu jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 100 juta jiwa dan seandainya pada saat itu sudah ada upaya yang sungguh-sungguh tentunya tidak perlu penduduk Indonesia meledak seperti sekarang ini.

Sekarang tingkat kematian menurun namun tingkat kelahiran tetap bertambah menurut primitif rate maka semakin sesaklah bumi kita ini dan semakin sulitlah memenuhi kebutuhan pangan karena tingkat pertumbuhan penduduk dunia yang sekitar 1,2 persen per tahun sedangkan lahan pertanian hanya bertambah 0,8 persen saja. Jumlah lahan ini pun semakin hari semakin berkurang saja karena semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan.

Selain menimbulkan berbagai macam masalah sosial, jumlah penduduk yang semakin bertambah ini juga menimbulkan dampak pada masalah yang lain, yaitu masalah lingkungan. Semakin banyak penduduk berarti semakin banyak areal persawahan dan hutan yang berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk.

Selain mengakibatkan kehancuran hutan yang ada, pertambahan penduduk yang semakin tak terkendali juga akan bisa mengakibatkan pencemaran yang luar biasa pada pantai dan lautan. Ancaman utama untuk laut, 70 sampai 80 persen dari seluruh polusi bahari adalah sedimen dan pencemar yang mengalir ke laut dari sumber daratan, seperti lapisan tanah teratas, pupuk, pestisida dan segala bentuk buangan industri. Terumbu karang, khususnya, amat rawan terhadap sedimen

Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis. Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan. Aturan ini merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsung ditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis. Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan

Penduduk yang menjadi sasaran program seringkali tidak tahu kemana kebijakan yang membawa mereka berarah, oleh karena informasi dan transparansi publik dalam hal kependudukan kurang bisa diakses oleh kebanyakan orang, hanya terbatas pada pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat saja. Perlunya reformasi birokrasi dalam hal kependudukan, sebelumnya banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama, hal ini kontan membuar masyarakat bingung.

Perlunya keserasian kerja antara daerah dan pusat, tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang secara filosofis telah sempurna pada tingkat pusat, dapat dihantarkan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa tanpa ada reduksi. Perhatian terhadap isu lama yang belum terselesaikan seharusnya lebih diutamakan.

Diharapkan tidak saja fokus pada penekanan jumlah penduduk, namun tidak memperhatikan tingkat kematian penduduk, pemerintah harus menyediakan program yang menjamin hak-hak tersebut, antara lain dengan jaminan kesehatan hingga ke pelosok daerah, penyediaan informasi demografi dan kesehatan yang memadai dan mudah diakses, serta pelayanan pasca penanganan.

Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. Kebijakan kependudukan dapat dilakukan melalui 3 komponen perkembangan penduduk, yaitu:

a. Kelahiran (Fertilitas)

Kebijaksanaan untuk mempengaruhi tingkat fertilitas, yaitu:

1. Kebijakan pronatalis

Kebijakan pronatalis merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan trend fertilitas dan pertumbuhan penduduk.

Bentuk-bentuk umum yang terkenal adalah:

- a. Propaganda pronatalis
- b. Program-program yang mendorong keluarga, sistem perpajakan, dan insentif untuk seorang ibu
- c. Pembatasan terhadap distribusi dan penggunaan kontrasepsi dan aborsi

2. Kebijakan Antinatalis

Contoh dari kebijakan antinatalis:

a. Program keluarga berencana nasional

Program ini ditujukan untuk mengurangi fertilitas dengan memberikan peralatan, pelayanan, dan informasi tentang kontrasepsi

b. Pendekatan non keluarga berencana

Diarahkan untuk menurunkan fertilitas, menyadari bahwa besarnya keluarga hanyalah merupakan respon terhadap cara seorang melihat dunia sosialnya.

Di Indonesia, Kebijakan kependudukan terkait dengan fertilitas adalah kebijakan terkait usaha untuk mengurangi kelahiran. Usaha tersebut ditempuh dengan cara tidak langsung, berupa:

1. Persebaran penduduk, migrasi dan urbanisasi
2. Kegiatan penelitian, pengkajian serta pengembangan dalam upaya pembangunan kualitas penduduk
3. Pendidikan kependudukan
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksana

Masalah yang mempengaruhi fertilitas secara tidak langsung di Indonesia adalah:

1. Umur perkawinan pertama
2. Sukarnya perceraian
3. Perkawinan ulang

b. Kematian (Mortalitas)

Usaha Pengurangan kematian dapat dilakukan dengan:

1. Bidang kesehatan
2. Pangan dan gizi
3. Pendidikan
4. Perumahan
5. Penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan

c. Migrasi

Kebijakan migrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat eksplisit, menyangkut perngaturan ijin tempat tinggal dan transmigrasi

2. Kebijakan yang bersifat implicit, pengaturan pembangunan regional yang integrated, pengembangan pusat-pusat pengembangan skala kecil, serta distribusi wilayah industry kecil
3. Kebijakan yang bersifat restriktif, usaha untuk melarang atau membatasi migrant masuk ke kota tertentu yang sudah padat
4. Kebijakan restraining, usaha untuk menahan agar penduduk pedesaan tidak pindah ke kota, melalui penciptaan lapangan kerja di daerah asal
5. Kebijakan yang bersifat divisionary, usaha untuk membuat daerah alternative menjadi menarik (membuka kesempatan kerja), sehingga mempengaruhi arus dan arah migran

Program kebijakan kependudukan di Indonesia seperti:

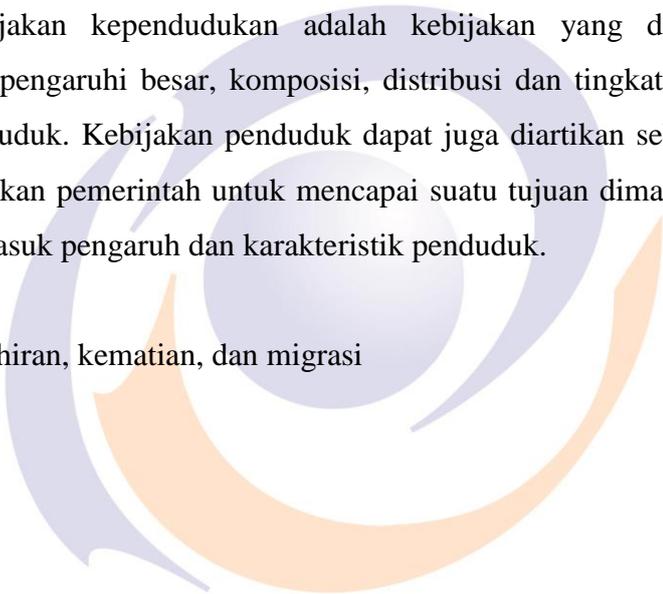
- a. Meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat, termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, peningkatan status wanita
- b. Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan
- c. Merangsang terciptanya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera
- d. Meningkatkan program transmigrasi secara teratur dan nyata
- e. Mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota secara lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh
- f. Mengatasi masalah tenaga kerja
- g. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup

C. Latihan

1. Apa yang dimaksud kebijakan kependudukan?
2. Sebutkan komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kependudukan!

D. Jawaban

1. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan penduduk dapat juga diartikan sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk.
2. Kelahiran, kematian, dan migrasi



Universitas
Esa Unggul

E. Daftar Pustaka

- a. Rusli, Said. (2013). Pengantar Ilmu Kependudukan
- b. Thomas Malthus, et.al.(2007). Kependudukan: Dilema dan Solusi. Jakarta : Nuansa
- c. Effendi, Tadjadunnin Noer. 1991. Kebijakan Kependudukan: Teori, Konsep, dan Penerapan di Indonesia. UGM <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/10782/8076>
- d. Hidayat, Nasrullah. 2013. Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/download/2493/1948>

